

## **PARTISIPASI POLITIK DAN DINAMIKA DEMOKRASI DI TIDORE-MALUKU UTARA**

**Kamaruddin Salim**

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Nasional

kamaruddin@civitas.unas.ac.id

### **ABSTRAK**

*Partisipasi Politik dan Dinamika Demokrasi di Kota Tidore Kepulauan memberikan gambaran menarik dalam kajian politik di Indonesia. Dalam kontestasi politik seiring dengan bergulirnya Pilkada Langsung telah mencerdaskan masyarakat Kota Tidore Kepulauan dalam partisipasi politik dan berdemokrasi. Meningkatnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019. Menguatnya politik paternalistik masyarakat dengan melemahnya peranan partai politik dalam mencerdaskan masyarakat berpolitik. Budaya politik keterbukaan dengan peranan aktor politik mencuat sebagai kelompok civil society yang mampu mempengaruhi kebijakan birokrasi atau terlibat dalam menentukan siapa yang layak duduk di pemerintahan maupun di lembaga legislatif. Dinamisasi politik yang ditandai dengan sirkulasi elit baru dalam ruang sosial-politik memberikan gambaran bahwa masa depan demokrasi dengan melakukan penelitian penelitian deskriptif analitis guna memahami proses partisipasi politik dan demokratisasi yang menjadi pembelajaran terpenting bagi masyarakat dalam berpolitik.*

**Kata Kunci:** *Demokrasi, Pemilu Serentak, Budaya Politik, dan Sirkulasi Elit*

### **ABSTRACT**

*Political Participation and the Dynamics of Democracy in the City of Tidore Islands provide an interesting picture in political studies in Indonesia. In political contestation along with the passing of Direct Local Election, the people of Tidore Islands have been educated in political participation and democracy. Increased level of community political participation in the 2019 Concurrent Election. Strengthening of community paternalistic politics with the weakening role of political parties in educating the political community. The political culture of openness with the role of political actors emerged as a civil society group that was able to influence bureaucratic policies or be involved in determining who deserved to sit in the government or in the legislature. Political dynamics characterized by the circulation of new elites in the socio-political space illustrates the future of democracy by conducting analytical descriptive research in order to understand the process of political participation and democratization which is the most important learning for people in politics.*

**Keywords:** *Democracy, Concurrent Election, Political Culture, and Elite Circulation*

## **Pendahuluan**

Partisipasi politik sesungguhnya merupakan suatu konsep yang populer dalam kajian ilmu politik. Namun demikian penggunaannya bermacam-macam sehingga menimbulkan konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar sarjana ilmu politik menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan Partisipasi politik adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik.

Definisi partisipasi politik secara umum yaitu tentang menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan umum. Hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik. Di luar bentuk tersebut, masih ada ragam bentuk lainnya. Partisipasi politik secara sederhana dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi pembuatan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Darmawan, 2015:151-152). Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pimpinan pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik atau koreksi, atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum (Surbakti, 2010:151).

Uraian Surbakti, terkait dengan partisipasi politik yang berpijak pada seluruh aktivitas warga negara yang dapat memengaruhi kebijakan dan dapat menentukan kepemimpinan seseorang di dalam masyarakat. Apa yang dimaksudkan oleh Surbakti, tentunya terdapat beberapa definisi berdasarkan sosiologi yang mengkaji aspek partisipasi politik, yang dikemukakan oleh berbagai tokoh sosiologi. Benang merahnya adalah bahwa sosiologi pada dasarnya memusatkan perhatiannya pada masyarakat dan individu, karena menurut sosiologi, masyarakat sebagai tempat interaksi tindakan-tindakan individu yang mana tindakan tersebut dapat memengaruhi masyarakat.

Memahami ragam definisi yang diuraikan di atas, partisipasi dapat dipahami sebagai suatu usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan memengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Usaha ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan tanggungjawab mereka terhadap kehidupan bersama sebagai suatu bangsa dalam negara. Partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang ke yang lain, tentu kadar partisipasi politikpun bervariasi. Dan konsep partisipasi politik pun mencakup apa yang disebut apatisisme politik, alienasi politik dan kekerasan politik. Bentuk partisipasi politik yang menghendaki banyak upaya ialah keikutsertaan memberikan suara dalam suatu kegiatan pengumutan suara (Maran, 2013: 147-151).

Partisipasi politik yang aktif dari masyarakat dalam setiap kontestasi politik baik dalam Pemilu Serentak 2019 khususnya Di Tidore Kepulauan. Berdasarkan data KPUD Tidore Kepulauan terkait dengan target Data Pemilih 2019 Kota Tidore Kepulauan; laki-laki berjumlah 35.469 dan pemilih perempuan berjumlah 35.914 dan total DPT 71.383. maka KPUD TIKEP menargetkan untuk pelibatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 sebanyak 75%, namun target yang ditentukan oleh KPUD melebihi ekspektasi yakni tingkat partisipasi masyarakat

meningkat menjadi 89% (Hasil wawancara via telepon dengan Abdulla Dahlan, SE. Ketua KPUD Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024, Selasa 18 Juni 2019, Pukul 20.00 WIB).Tren meningkatnya partisipasi politik, memberikan gambaran bahwa partisipasi masyarakat kian relevan untuk menjaga kualitas demokrasi. Selain untuk membangkitkan kembali geliat partisipasi publik, gerakan seperti itu dapat menjadi penyeimbang di tengah rendahnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan langsung dalam partai politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Trend meningkatnya partisipasi politik di Tidore dalam Pemilu Serentak tersebut, dapat diamati dari dua jenis partisipasi politik para pemilih. Menurut Munandar Nugraha, partisipasi ada jenis partisipasi, yakni. Pertama, jumlah pemilih yang hadir dan memberikan hak suaranya di bilik suara. *Kedua*, masyarakat yang terlibat aktif dalam mengawal proses pemilu dan tahapan pemilu, baik beropini, buat tulisan di media sosial dan bahkan melaporkan pelanggaran pemilu yang ditemukannya ke BAWASLU. (Hasil Wawancara dengan Munandar Nugraha, S.IP., M.AP. Anggota Bawaslu Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Juni 2019, pukul. 11.20 WIB Di Universitas Nasional). Memahami dua jenis partisipasi politik tersebut dapat pahami bahwa, tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak 2019 terbilang tinggi dan meningkat. Karena, selain kehadiran masyarakat yang memberikan hak suaranya di Tempat Pengumutan Suara (TPS) dan masyarakat Tidore tergolong aktif dalam beropini maupun terlibat aktif dalam mengawal proses Pemilu Serentak tersebut. (Hasil Wawancara dengan Hambali Muhammad, S.Sos., M.Si. Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019, pada Rabu, 19 Juni 2019, pukul. 18.00 WIB Di Jakarta Selatan)

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak di Tidore tidak semata aktif memberikan hak suara dalam kontestasi politik namun terlibat aktif dalam mengawal dan mengawal segala proses politik yang ada dalam Pemilu Serentak. Maka, sebagaimana yang dipaparkan dua jenis partisipasi oleh Munandar memberikan gambaran bahwa, pelibatan masyarakat Tidore secara umum seperti kampanye atau memberikan opini positif di media sosial dengan kesadaran dan memperjuangkan figur yang diusung guna lolos sebagai anggota legislatif di DPRD Tidore Kepulauan. Namun, tingginya partisipasi politik masyarakat tidak semata-mata menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi bila dilihat dari dua jenis partisipasi tersebut, partisipasi masyarakat didorong dari faktor kampung-kampung atau *gam-gam* dan ego birokratisasi di Tidore.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis karena beberapa alasan: *pertama*, metode yang digunakan karena penelitian ini bermaksud mendeskripsikan suatu fenomena secara mendalam, dalam hal ini adalah partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak. *Kedua*, penelitian deskriptif merupakan penelitian di mana pengumpulan data dilakukan dengan menguji pernyataan penelitian atau hipotesis yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian saat ini. *Ketiga*, penelitian deskriptif menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objektif dan subjektif yang diteliti secara tepat terkait dengan kontestasi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu Serentak di Kota Tidore Kepulauan (Qodir,2016). Penelitian ini teknik pengumpulan datanya yaitu dengan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, pendapat, pendapat para ahli yang relevan dengan masalah yang akan diteliti Penulis menggunakan landasan teori

partisipasi politik, Demokrasi, teori politik paternalistik, Sirkulasi Elit dan Budaya Politik Gabriel, untuk menjadi dasar dalam menganalisis data yang diperoleh tentang demokrasi, politik paternalistik, peran elit dan aktor baru dan keterkaitannya dengan proses partisipasi politik dalam menciptakan terlaksannya kontestasi politik yang dinamis dan mencerdaskan masyarakat.

### **Demokrasi dan Dinamisasi Sirkulasi Elit**

Dalam sejarah Indonesia untuk pertama kalinya melakukan Pemilu Serentak, baik memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih para Anggota Legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan dalam sistem kepemiliaun di Indonesia tentunya berdampak terhadap proses politik dan partisipasi politik dalam sistem politik Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia merupakan negara yang akan menjadi perhatian dunia terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019.

Demokrasi dikaji secara teoritis dipahami sebagai suatu pemerintahan hal mana rakyat ikut serta memerintah (*modergen*), secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun tidak langsung (*representatif*), yang terdapat dalam negara-negara modern. Dengan demikian, demokrasi itu pada hakikatnya menunjukkan pada cara atau sistem serta yang mana sistem itu dapat dilangsungkan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Dari penjelasan di atas dapat dipastikan bahwa tidak ada sebuah pengertian atau definisi demokrasi yang disepakati oleh semua pihak, seperti disampaikan di awal. Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi secara ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan *dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat*, tetapi pengertian tersebut tidak pernah ada secara empiris dalam sejarah umat manusia. Atas penafsiran tersebut Maurice Duverger dalam Sulardi mengkritik dengan mengatakan, “Kalau menurut arti kata seperti yang diartikan oleh umum, maka demokrasi yang sungguh-sungguh tidaklah pernah ada dan tidak mungkin ada. Adalah pertentangan dengan kodrat alam bahwa golongan yang berjumlah besar memerintah, sedangkan golongan yang sedikit jumlahnya harus diperintah (Sulardi, 2012: 26).

Demokrasi lazimnya didefinisikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Berarti dalam konteks demokrasi, pemerintah yang berkuasa atau kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, oleh karena itu pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus mengacu pada kehendak rakyat. Seiring dengan perkembangan istilah tersebut dianggap sebagai demokrasi tradisional. Istilah ini digugat karena dianggap tidak dapat lagi menjelaskan kondisi kehidupan sosial dan politik yang berkembang di masyarakat dikarenakan persoalan politik penguasa pemerintahan yang selalu menggunakan istilah demokrasi dalam praktiknya diplintir untuk kepentingan penguasa semata. Misal, Schumpeter menyatakan secara rinci kekurangan dari apa yang diistilahkannya “teori demokrasi klasik –yang mendefinisikan demokrasi dengan istilah-istilah “kehendak rakyat” (*the will of the people*); “sumber dan tujuan kebaikan bersama” (*the commond good*). (Suryadi, 2007).

Memahami apa yang digambarkan Schumpeter tersebut, bila dikaitkan dengan praktik demokrasi di Tidore tentu memberikan ruang perdebatan yang

menarik. Di mana, Tidore merupakan salahsatu Kerajaan Islam yang tertua di Indonesia yang memiliki pengaruh dan sejarahnya sendiri dibandingkan dengan Tiga Kerajaan Islam di Provinsi Maluku Utara. Sebagaimana Empat kerajaan tersebut yang hingga kini masih eksis dan mempunyai Sultan di masing-masing kerajaan. Dapat dibayangkan, kritik Schumpeter terkait dengan praktik demokrasi klasik sesungguhnya terjadi di Tidore. Akan tetapi, Sultan sebagai represntasi pemimpin Adat dan Kultural serta Agama. Namun, acapkali diseret masuk ke dalam kontestasi politik lokal maupun nasional. Hal ini sebagaimana oleh istilah Schumpeter menjadi sumber dan tujuan untuk kebaikan bersama (Salim, 2018. 45).

Pemilu Serentak sebagai salah bagian proses demokrasi langsung yang berlangsung di Tidore menandakan dinamisasi demokrasi yang mengarah pada adanya sirkulasi elit baru dalam pemerintahan dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat ketika, Sultan Tidore Husain Sjah mencalonkan sebagai anggota DPD RI dan kemudian terpilih. Majunya Sultan mendapat dukungan positif dari Masyarakat Maluku Utara dan Tidore pada Khususnya. Di mana, perolahan suara Sultan dalam AGK 138.000 Suara, AHM 132 .000 suara di PILGUB Maluku Utara sedangkan Sultan 141.000 suara. Dan ini menjadi sejarah dalam di Maluku Utara sejak bergulirnya Pemilukada dan Pemilu. Terpilihnya Sultan, tantunya menjadi harapan baru bagi masyarakat yang menggantungkan segala kepentingan politik secara otonomi mereka kepada Sultan Tidore. Disamping itu, visi politik Sultan yang bermuatan historis masa lalu dengan mendorong Otonomi Khusus untuk Tidore mendapat respon positif dari masyarakat. (Hasil wawancara via telepon dengan Faisal Anwar, S.Km. Mantan Ketua Djaman Maluku Utara Periode 2014-2015, Rabu 19 Juni 2019. Pukul. 18.30 WIB

Terpilihnya Sultan Tidore sebagai Anggota DPD RI dan menjadi wakil masyarakat Tidore dan masyarakat Maluku Utara secara umum di Pusat menandakan adanya proses demokrasi yang dinamis dan terjadinya sirkulasi elit di aras lokal Tidore. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam sejarah politik Maluku Utara, keterlibatan Kesultanan Islam di Zajirah Al Mulk Moloku Kie Raha telah lama ada. Sebagaimana, kokohnya posisi Sultan Ternate selama beberapa dekade dihitung mulai dari setelah kemerdekaan Indonesia dan cukup diperhentikan sikap dan kuasa politiknya di tingkat Pusat. Maka, terpilihnya Sultan Tidore Husain Sjah menuju Senayan Jakarta menandakan terjadinya sirkulasi elit terutama di inetrnal kesultanan yang ada di Maluku Utara. Disamping itu, terpilihnya Sultan Tidore dengan meraih menjadi pemantik semangat baru guna memperjuangkan kepentingan masyarakat Tidore dan Maluku Utara secara umum yang mana, tidak berbasis pada semangat etnis tetapi kepentingan masyarakat secara umum. Hal ini terbukti dengan perolehan Sultan di Tidore 132.00 suara dan di Ternate 46.000 suara dan ini menjadi perolehan suara tertinggi dalam setiap pilkada yang ada di Maluku Utara. (Hasil wawancara via telepon dengan Faisal Anwar, S.Km. Mantan Ketua Djaman Maluku Utara Periode 2014-2015, Rabu 19 Juni 2019. Pukul. 18.30 WIB)

Dalam kajian elit dalam sosiologi politik, dapat di pahami bahwa elite dapat didefinisikan sebagai mereka yang berhubungan dengan, atau memiliki, posisi penting di dalam satu kelompok atau masyarakat. Disini peran elit adalah bagaimana mempengaruhi proses pembuatan kebijakan agar kebijakan tersebut berpihak pada kepentingan elit dan bukan kepentingan publik. Disini posisi rakyat tidak di

perhitungkan karena segala bentuk kebijakan hanya untuk mengokohkan status golongan elit sebagaimana yang diungkapkan oleh Wertheim, bahwa massa memang tidak diperhitungkan atau jika citra tentang massa itu ada maka mereka itu adalah suatu kelompok yang dibuat sangat terlihat dan terutama mereka dianggap sebagai ancaman (Wertheim, : 4).

Perlu dipahami bahwa, sirkulasi atau pergantian elite politik pada prinsipnya merupakan sesuatu yang hal yang niscaya. Sebab, tidak mungkin ada orang yang akan hidup dan berjaya selamanya. Ada masa naik, dan jika pun mengalami masa kejayaan, pasti akan mengalami masa surut, sebagaimana keadaan pasang surut di laut. Sebab, tidak ada dan tidak akan pernah ada yang bisa melawan usia. Ada masa lahir, bertumbuh-berkembang, berkuasa, lalu bisa mengalami masa kembali tidak berkuasa atau langsung mati. Karena itulah, pergantian kekuasaan pasti terjadi di dalam sistem politik apa pun dan di mana pun, termasuk di Tidore. Selain terpilihnya Sultan Tidore sebagai Anggota DPD RI. Dalam Pemilu Legislatif 2019 ini. Yang mana hasil PILEG di Kota Tidore Kepulauan menunjukkan trend positif terjadinya sirkulasi elit dilihat dari total 25 kursi yang diperebutkan oleh para Caleg. Ada 10 petahana (*incumbent*) yang kembali terpilih sebagai anggota DPRD TIKEP diantaranya PDIP Ahmad Laiman dan Ahmad Ishak, NasDem Mochtar Djumati dan Malik Muhammad, PAN Ratna Namsa, PKB Murad Polisiri dan Muhammad H. Fatah Demokrat Ridwan Muhammad Yamin, Golkar Elvri Conoras dan Naser Rabo. Sedangkan yang anggota legislatif yang baru terpilih berjumlah 15 orang (Hasil wawancara via telepon dengan Faisal Anwar, S.Km. Mantan Ketua Djaman Maluku Utara Periode 2014-2015, Rabu 19 Juni 2019. Pukul. 18.30 WIB). Ini menandai bahwa proses demokrasi dan sirkulasi elit di Tidore terbilang dinamis dan partisipasi politik masyarakat bawah dalam memilih wakil rakyat yang baru menjadi bagian tak terpisahkan melahirkan golongan elit politik baru guna memperjuangkan kepentingan mereka.

Para elit ini sebenarnya adalah lapisan bawah dan golongan non elit ini sebenarnya mempunyai peran besar dalam melahirkan golongan elit. Menurut Ortega dalam Varma, mengatakan bahwa kebesaran suatu bangsa sangat tergantung kemampuan rakyat, masyarakat umum, kerumunan, massa, untuk menemukan simbol dalam orang pilihan tertentu, kepada siapa mereka mencurahkan segala antusiasme vital mereka yang sangat luas. Lebih lanjut Ortega mengatakan bahwa orang-orang yang terpilih adalah orang terkenal dan merekalah orang yang membimbing massa yang tidak terpilih seperti mereka (Varma, 1999:206.)

Dari uraian di atas, tampak bahwa penafsiran elite dan massa pada kacamata sosiologi politik terdapat beberapa penafsiran dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain sebagai berikut: Pareto penafsirannya terpengaruh oleh Gaetano Mosca, tetapi memiliki perbedaan dengan Mosca. Pareto, percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas terbaik mereka yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial dan politik. Menurut Pareto, elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama, yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Hal ini berbeda dengan Mosca, yang menyebutkan bahwa disetiap masyarakat yang terbentuk apapun senatisa muncul dua kelas, yakni; *pertama*, kelas yang memerintah dan *kedua*, kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit memegang

semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang bersifat legal, *arbitrer* (sewenang-wenang) dan menggunakan kekerasan.

Disamping itu, Mosca meneliti komposisi elit lebih dekat ketimbang Pareto, dengan mengenali kekuatan sosial tertentu. Mosca kemudian mengenalkan konsep sub elit yang merupakan kelas menengah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), manager industri, ilmuwan, dan mahasiswa. Kelas menengah ini, oleh Mosca dianggap sebagai elemen vital dalam mengatur masyarakat. Menurut Mosca, stabilitas politik ditentukan oleh lapisan kelompok menengah ini. Sedangkan menurut Pareto, antara *governing elite* dan *non-governing elite* senantiasa berebut kesempatan untuk mendapatkan bagian kekuasaan sehingga terjadinya sirkulasi antar elit. Setiap elit yang dapat bertahan apanila mampu mendapatkan dukungan dari masyarakat bawah. Akan tetapi, sirkulasi elit akan tetap berjalan karena secara individual baik elit keturunannya maupun elit yang diangkat atau ditunjuk akan mengalami kemunduran sesuai dengan waktu atau sebab-sebab biologis (Setiadi dan Kolip, 2013:40-41).

Sirkulasi elite dalam konteks pergantian kepemimpinan politik di lembaga legislatif khususnya di Kota Tidore Kepulauan merupakan salahsatu syarat bagi terwujudnya iklim demokrasi yang sehat dan dinamis di masyarakat. Fenomena kekerabatan politik dinilai berpotensi menghambat jalannya sirkulasi politik yang terbuka dan partisipatif. Fenomena banyaknya hubungan kekerabatan dalam kepemimpinan politik di Tidore semakin menguatkan gejala dinasti politik baik khususnya di masyarakat. Hal ini khususnya terekam dalam PILEG yang berlangsung beberapa periode sebelumnya. Di mana, Petahana Anggota DPRD TIKEP yang cenderung berupaya mempertahankan kekuasaan dengan tidak melimpahkan dukungan kepada kerabatnya atau figur lain dalam PILEG dan yang bersangkutan tidak mempunyai keberanian untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif fi tingkat Provinsi atau tingkat Pusat. Gejala ini dinilai publik cukup mengkhawatirkan, meski dari sisi perundang-undangan masih bisa dimungkinkan. Publik menilai pola penguasaan politik semacam itu bakal menjerumuskan kondisi politik menjadi tidak sehat dan berdampak negatif terutama praktik politik uang.

### **Relasi antar Aktor Politik dan Politik Kekerabatan**

Kajian mengenai relasi antar aktor politik dengan politik kekerabatan di Tidore terkait dengan kontestasi politik masyarakat. Sejatinya, relasi antar aktor tersebut cenderung terlibat aktif dalam setiap kontestasi politik baik yang berasal dari partai politik, birokrasi, maupun struktur informal seperti dari organisasi paguyuban, tokoh masyarakat, dan tokoh (aktivis) mahasiswa. Menandakan adanya proses yang mandeg dalam dinamika politik lokal di Tidore. Karena, politik kekerabatan yang dipraktekkan memberikan praktik budaya politik yang tidak cerdas.

Sementara, bila dipahami dari sejarah perjalanan praktik politik kekerabatan yang berkembang di Tidore. Di mana, lebih cenderung melibatkan aktor dan struktur, serta menyeret penguatan ego atas tradisi dari masing-masing etnis yang ada di kampung atau *gam-gam* di Tidore. Dengan mengedepankan parade kekuatan yang secara alamiah terus terpelihara kepentingannya, maka, Giddens (2009)

berpandangan bahwa kepentingan kelompok yang dominan erat berkaitan dengan pelestarian *status quo*. Dengan demikian, bentuk-bentuk makna yang menaturalisasikan kondisi yang telah ada dengan menghambat pengakuan atas sifat masyarakat manusia yang dapat diubah dan berciri historis berperan untuk melanggengkan kepentingan semacam itu. Sepanjang sejarah, kenyataan tersebut dipahami dan dapat mengacu pada kondisi-kondisi ketika relasi sosial tampak memiliki sifat undang-undang alami yang tetap dan tak dapat diganggu gugat, maka, kenyataan identitas tersebut dapat dipandang sebagai bentuk utama keberlangsungan proses naturalisasi masa kini.

Dengan kata lain, sejatinya, penonjolan kekuatan identitas etnis dan relasi yang dilakukan para aktor tersebut pada hakikatnya merupakan pijakan dari kondisi objektif etnisitas yang merasa berpeluang untuk menonjolkan eksistensinya dan tidak melanggar konstitusi, serta cita-cita demokrasi langsung. Dalam hal ini, kondisi dan kedudukan kelompok (identitas) etnis yang terlibat dalam Pemilu Serentak tersebut dapat mendorong lahirnya *civil society* yang kuat di daerah. Dalam konteks Tidore, peran aktor melalui organisasi paguyuban yang berbasis etnis sangat berpengaruh dan dominan dalam kontestasi politik.

Selain itu, keterlibatan aktor birokrat sebagai peran kelompok lapangan tengah yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat pemilih dan jejaringnya jauh lebih efektif daripada partai politik. Pemetaan lebih lanjut atas dominasi aktor informal dan struktur formal dalam kontestasi atas semangat politik kekerabatan dalam Pemilu Serentak di Tidore, dapat dilihat sampai sejauh mana usaha para aktor dalam membangun isu kampung-kampung dalam upaya untuk memetakan masyarakat pemilih berdasarkan garis keturunan dari para kontestan yang tampil sebagai Caleg. Tidak ada yang bisa menepis, betapa politik kekerabatan dapat terlihat dengan hadirnya para calon yang diusung oleh partai berbasis pada shering wilayah atau putra asli kampung itu sendiri. Terkait dengan peran kekuatan lapangan tengah yang dalam hal ini para aktor kampung yang mewakili kelompok dari kampung atau *gam-gam* masing-masing kandidat, mereka terus berupaya untuk melembagakan kekuatan politiknya. Walau secara struktur politik tidak dipandang serupa lembaga partai, namun, kekuatan ini mampu memetakan kekuatan politik para kandidat dengan secara politik yang berbasis politik kekerabatan.

Politik di aras lokal, sejatinya, merupakan suatu kontestasi politik yang setidaknya menguatkan salahsatu kelompok masyarakat yang mengedepankan ego kampung yang selama beberapa dekade ini belum tampil sebagai petarung utama dalam Pemilu Serentak terutama, pada putaran pertama proses pemilihan Anggota Legislatif. Aktor dari kelompok yang baru tampil sebagai kandidat anggota DPRD yang bersaing dengan petahan yang telah lama menjadi langganan PILEG, seperti PDIP Ahmad Laiman dan Ahmad Ishak, NasDem Mochtar Djumati dan Malik Muhammad, PAN Ratna Namsa, PKB Murad Polisiri dan Muhammad H. Fatah Demokrat Ridwan Muhammad Yamin, Golkar Elvri Conoras dan Naser Rabo.

Bila dirunut sejenak ke belakang, bahwa relasi antar aktor dalam setiap kontestasi politik menjadi satu rangkain mata uang yang tak dapat dipisahkan dalam memperjuangkan kepentingan politiknya di Tidore. Proses dominasi aktor-struktur dalam PILEG di Tidore, sesuai dengan sejarah kontestasi politik yang berlangsung di Kota Tidore Kepulauan senantiasa diwarnai dengan konflik,



salahsatunya adalah konflik yang bernuansa kampungnisasi atau *gam-gam*. Walau di lain sisi, basis konflik *gam-gam* tersebut merupakan akumulasi dari upaya untuk mempertahankan legitimasi politik para birokrat di Pemerintah Daerah ataupun lebih khusus para Aparatur Sipil Negara yang secara psikologi menunjukkan ataupun mengidentifikasi sebagai orang se-kampung ataupun rekomendasi dari atasannya.

Proses dominasi aktor-struktur baik di tingkat kampung, partai dan birokrasi sesungguhnya menjadi penanda bahwa persinggungan yang seakan menjadi bagian dari budaya politik kekerabatan yang sukar dihilangkan. Sesungguhnya memperburuk praktik demokrasi dan berpotensi maraknya terjadi politik uang. Oleh karena itu, relasi yang terbangun antara aktor dan struktur yang merasa mempunyai kekuatan politik kekerabatan akan tampil bahkan berani melegitimasi dirinya sebagai kekuatan penyeimbang dalam proses demokrasi di Tidore. Akibatnya, legitimasinya ketika berhadapan dengan para aktor berbasis pada kekerabatan maupun para kandidat yang menggunakan kampung atau *gam-gam* sebagai modal politiknya. Akan tetapi, sejauh ini, dominasi aktor-struktur yang menggunakan politik kampung hanya mencuat ketika proses PILEG sedangkan dalam arena politik yang lain di Tidore, yang lebih didominasi dipengaruhi oleh politik identitas etnis (Hasil wawancara via telepon dengan Abdulla Dahlan, SE. Ketua KPU Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024, Selasa 18 Juni 2019, Pukul 20.00 WIB)

Pada hakikatnya, faktor politik kekerabatan yang diboncengi oleh perebutan dan pembagian kekuasaan merupakan faktor terbesar meluasnya isu politisasi ikatan kekerabatan pada setiap momentum politik, baik pada PILKADA maupun PILWAKO (Pemilihan Walikota) maupun PILEG. Indikatornya, pertarungan politik kekerabatan dalam momentum politik selalu berpijak pada latar belakang identitas kewargaan atau latar belakang daerahnya. Tentunya, hal tersebut dapat dipelajari sejak terbentuknya Pemekran Tidore menjadi Kota Madya pada tahun 2003, serta resistensi konflik dalam tiap kontestasi politik. Resistensi konflik politik kekerabatan terfokus pada sentimen antar warga *gam* yang tentunya bermuara pada perebutan kursi kekuasaan di pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Sebagaimana di ketahui, politik kekerabatan yang dikatakan dominan dalam pertarungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai hasil mutlak. Karena, sumber daya manusia yang dilegitimasi kepada seorang aktor atau tokoh yang bermodalkan semangat kampung-kampung tersebut terbilang mengakar sehingga aktor tersebut memiliki kesiapan sumber daya manusia dan modal ekonomi yang cukup dan selalu tampil dalam kontestasi politik di Tidore.

Dalam relasi politik antar aktor dalam masyarakat yang multietnik seperti Tidore, dinamika politik senantiasa memiliki “tegangan” yang lebih tinggi disbanding dengan daerah yang relatif homogen. Hal tersebut dapat dilihat pada kontestasi politik di tingkat kota yang selalu menyita perhatian pemerintah, pengamat politik maupun pimpinan partai politik karena persaingan yang melibatkan simbol-simbol etnisitas baik agama, suku, daerah asal, putra daerah atau pendatang. Penggambaran atas realitas politik di Tidore dengan perilaku para aktor partai dan kandidat yang diusung untuk tampil dalam kontestasi PILEG, tentunya, menggambarkan kondisi suatu daerah yang demokratis yang ditandai dengan adanya dan berfungsinya partai politik di daerah tersebut. Apalagi, partai politik adalah

sebuah lembaga yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang secita-cita, seideologi yang bekerja, berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dengan kata lain, partai politik adalah merupakan sebuah lembaga yang mempunyai fungsi penyaringan pendapat, pembulatan, melalui suatu perbincangan untuk dapat memenangkan pemilihan legislatif (Salim, 2015:1670).

Dengan asumsi lain bahwa demokrasi tidak dapat tumbuh tanpa partai politik, akan tetapi, kita juga harus mengakui betapa demokrasi tidak sempurna tanpa partai politik. Eratnya hubungan antara partai politik dengan demokrasi terletak pada hakikat dan latar belakang berdirinya partai politik yang tumbuhkembang seiring dengan semangat kebebasan dan keberpihakan pada naluri kerakyatan. Sehingga dapat dikatakan, partai politik adalah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Artinya hidupnya tidak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya. Kondisi semacam ini, berbeda dengan realitas politik di Kota Tidore Kepulauan, secara umum masyarakat beranggapan bahwa semua hal yang dilakukan tentu mempunyai tendensi etnis dan langsung direspon dengan ragam asumsi politis.

Secara teoritis, sejatinya dapat dipahami bahwa partai politik adalah sekelompok orang yang berusaha mengejar kedudukan dalam pemerintah yang secara bersama-sama terkait oleh identitas atau pun label yang dimilikinya. Partai politik merupakan sebuah wadah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat serta menegakkan amanat dan dilakukan melalui suatu proses politik; yakni PILEG. Secara umum dapat dipahami bahwa fungsi partai politik sebagai wadah untuk memperjuangkan ideologi dan cita-cita secara kelembagaan. Dalam hal ini, politik yang sama yakni memaksimalkan terpenuhinya kepentingan kekuasaan baik dalam lingkungan yang terbatas maupun dalam wilayah yang luas. Di sini, partai politik berfungsi sebagai suatu lembaga yang dapat memperjuangkan dan mendistribusikan kekuasaan. Salah satu fungsi inilah yang paling menonjol dilakukan oleh para pimpinan parpol. Akan tetapi, berpijak pada realias tentang kondisi partai di Kota Tidore Kepulauan, sejatinya, partai belum menjalankan fungsinya dengan secara baik dan maksimal. (Hasil wawancara via telepon dengan Abdulla Dahlan, SE. Ketua KPUD Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024, Selasa 18 Juni 2019, Pukul 20.00 WIB).

Dalam konteks peran partai dan kandidat yang diusung melalui koalisi, ternyata para elit partai masih menggunakan kekuatan aktor yang berbepengaruh atau terpandang di masyarakat dalam memproduksi gagasan politik kekerabatan sebagai politik yang bercirikan demokrasi. Persoalan utamanya tatkala menguatnya politik etnis yang dimodifikasi oleh aktor politik kemudian menjadi isu dalam PILEG, sudah barang tentu, modivikasi tidak mutlak terpusat di satu etnis atau di suatu wilayah tertentu. Hal ini mengingat para aktor partai memahami akan pemahaman politik etnis masyarakat Tidore yang bermuara pada kesadaran kelompoknya dan kesadaran menghormati elit politik yang berasal dari kerabat atau kampung atau *gam-gam*. Oleh sebab itu, partai politik di daerah, dapat memposisikan narasi sentimen kampung yang cenderung berlebihan, namun, masih memungkinkan dalam merepresentasikan politik kekerabatan dalam proses Pemilu Serentak 2019.

## Simpulan

Partisipasi politik yang aktif dari masyarakat Tidore dalam Pemilu Serentak 2019 terbilang tinggi dan melebihi target yang dicanangkan oleh KPUD TIKEP sesungguhnya menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan hak suara dan terlibat aktif dalam mensukseskan pemilu menjadi satu rangkaian yang tak terpisahkan dalam proses demokrasi terutama di aras lokal.

Demokrasi dikaji secara teoritis dipahami sebagai suatu pemerintahan hal mana masyarakat ikut serta memerintah (*modergeren*), secara langsung yang terdapat pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana (demokrasi langsung), maupun tidak langsung (*representatif*), yang terdapat dalam negara-negara modern. Dengan demikian, demokrasi itu pada hakikatnya menunjukkan pada cara atau sistem serta yang mana sistem itu dapat dilangsungkan untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Terbangunnya relasi antar aktor dan tingginya partisipasi politik masyarakat dalam mendorong proses demokrasi yang sehat. Dengan sadar melahirkan satu tahapan baru dalam yang berkaitan dengan adanya sirkulasi elit Politik di Tidore serta mewujudkan harapan bersama dengan Terpilihnya Sultan, tantunya menjadi roh penyemangat baru bagi masyarakat yang menggantungkan segala kepentingan politik secara otonomi mereka kepada Sultan Tidore. Disamping itu, visi politik Sultan yang bermuatan historis masa lalu dengan mendorong Otonomi Khusus untuk Tidore mendapat respon positif dari masyarakat.

Dalam konteks peran partai dan kandidat yang diusung melalui koalisi, ternyata para elit partai masih menggunakan kekuatan aktor yang berpengaruh atau terpendang di masyarakat dalam memproduksi gagasan politik kekerabatan sebagai politik yang bercirikan demokrasi. Hal itu di lakukan, karena secara umum partai kesulitan merndapatn figur baru guna menguatkan dan mentransformasikan kepentingan dan ideologi partai kepada masyarakat dan sendiri belum mampu melaksanakan fungsunya dengan maksimal sebagai organisasi yang berkewajiban untuk melakukan kaderisasi politik dan komunikasi politik yang baik terhadap masayrakat Tikep.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Almond, Gabriel A-Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Penerjemaah: Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara
- Ikhsan Darmawan, Ikhsan. 2015. *Mengenal Ilmu Politik*, Jakarta: Kompas.
- Giddens, Anthony. 2009. *Problematika dalam Teori Sosial, Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisa Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Qodir, Zuly. 2016. *Teori dan Praktik Politik Di Indonesia. Memahami Partai, Pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.

Sulardi, 2012. *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang

Varma, S.P., 1999. *Teori Politik Modern*, Jakarta: RajaGrafindo Persada

### **Jurnal:**

Salim, Kamaruddin. 2018. *Dinamika Sosial-Politik dan Masa Depan Demokrasi di Maluku Utara*. Prosiding Seminar Nasional P4M Universitas Nasional.

——— 2015. *Politik Identitas di Maluku Utara*. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan. Vol.11. N0.02.

### **Data Kualitatif:**

Hasil wawancara via telepon dengan Abdulla Dahlan, SE. Ketua KPUD Kota Tidore Kepulauan Periode 2019-2024, Selasa 18 Juni 2019, Pukul 20.00 WIB

Hasil wawancara via telepon dengan Faisal Anwar, S.Km. Mantan Ketua Djaman Maluku Utara Periode 2014-2015, Rabu 19 Juni 2019. Pukul. 18.30 WIB

Hasil Wawancara dengan Hambali Muhammad, S.Sos., M.Si. Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Periode 2014-2019, pada Rabu, 19 Juni 2019, pukul. 18.00 WIB Di Jakarta Selatan

Hasil Wawancara dengan Munandar Nugraha, S.IP., M.AP. Anggota Bawaslu Jakarta Selatan pada Kamis, 20 Juni 2019, pukul. 11.20 WIB. Di Universitas Nasional